



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA (LKJ) TRIWULAN I 2023

PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmatNya sehingga Laporan Kinerja Triwulan I Pusat Pendidikan KP Tahun 2023 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja atas target triwulan I yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2023, untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat, dan juga sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Pusat Pendidikan KP. Penyusunan Laporan

Kinerja Pusat Pendidikan KP merupakan pemenuhan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 adalah wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pendidikan KP menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Diharapkan, Laporan Kinerja ini juga sebagai upaya perbaikan kesinambungan agar Pusat Pendidikan KP senantiasa meningkatkan kinerjanya, dan dapat memberikan gambaran tentang program, kegiatan, dan capaian kinerja bidang pendidikan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Terima kasih kami sampaikan untuk pihak – pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi atas kinerja Pusat Pendidikan KP. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di triwulan mendatang.

Jakarta, 17 April 2023

Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan,



Dr. Bambang Suprakto, A.Pi, S.Pi, MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2	
DAFTAR ISI	3	
DAFTAR TABEL	4	
DAFTAR GAMBAR	5	
RINGKASAN EKSEKUTIF	6	
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	9
B.	Tujuan	10
C.	Tugas dan Fungsi	10
D.	Keragaan SDM Pusat Pendidikan KP	11
E.	Sistematika Laporan Kinerja.....	12
BAB II	PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A.	Rencana Strategis	15
B.	Rencana Kerja Tahun 2023.....	18
C.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	19
D.	Pengukuran Kinerja	21
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
A.	Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2023	23
B.	Evaluasi dan Analisis Kinerja	25
C.	Akuntabilitas Keuangan	43
BAB IV	PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI	
A.	Capaian Indikator Kinerja Utama	47
B.	Permasalahan dan Rekomendasi.....	48
LAMPIRAN		
I.	Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2023	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Matrik Dukungan Pusat Pendidikan KP terhadap Program Prioritas KKP 16
Tabel 2.2	Rencana Kerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2023 18
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2023 19
Tabel 3.1	Target dan Capaian Triwulan I Tahun 2023 Pusat Pendidikan KP 25
Tabel 3.2	Jumlah peserta didik pada Satuan Pendidikan lingkup KKP pada TA 2022/2023 30
Tabel 3.3	Capaian IKU 17 : Aparatur KKP yang diberikan beasiswa (Orang) 35
Tabel 3.4	Sebaran Peserta Tubel Tahun 2019 – 2022 36
Tabel 3.5	Capaian IKU 19 : Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Pendidikan KP (%) 41
Tabel 3.6	Capaian IKU 20 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan Pusat Pendidikan KP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) 42
Tabel 3.7	Tabel realisasi anggaran per jenis belanja Pusat Pendidikan KP 43
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Tahun 2023 43

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Hasil capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2023 pada tampilan web:kinerjaku.kkp.go.id	7
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Pusat Pendidikan KP	11
Gambar 1.2	Sebaran UPT Pendidikan KP	11
Gambar 1.3	Keragaan Pegawai Pusat Pendidikan KP	12
Gambar 1.4	Sebaran Pegawai UPT Pendidikan KP	12
Gambar 3.1	Gambar Capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2023	23
Gambar 3.2	Capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2023 pada tampilan web:kinerjaku.kkp.go.id	23
Gambar 4.1	Capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2023 pada tampilan web:kinerjaku.kkp.go.id	47

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri KP No.48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau disingkat BRSDM KP, memiliki tugas menyelenggarakan riset di bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Pelaksanaan program riset dan SDM KP dilakukan antara lain melalui kegiatan pendidikan. Kegiatan pendidikan ini jika dijabarkan memiliki tiga poin utama, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Diharapkan, kontribusi Pusat Pendidikan KP dan Satuan Pendidikan KP berperan dalam pencapaian target pada program prioritas KKP, yaitu: (1) Target perluasan kawasan konservasi 30 persen dari seluruh wilayah perairan Indonesia; (2) Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota berdasarkan zonasi; (3) Pengembangan budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; (4) Menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik; (5) Program 'Bulan Cinta Laut' dengan membersihkan laut dari sampah di seluruh Wilayah Perairan Indonesia.

Laporan Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2023 berisikan tentang capaian dalam rangka pencapaian target triwulan I yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Program dan Kegiatan Pusat Pendidikan KP Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Keputusan Kepala Pusat Pendidikan KP Nomor 177/PER-BRSDM.4/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Rencana Strategis Pusat Pendidikan KP Tahun 2022-2024 dan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan KP Nomor 59/PER-BRSDM.4/2022 tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Pendidikan KP Tahun 2022 – 2024.

Pusat Pendidikan KP di bulan Januari 2023 telah menetapkan dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2023, yang terdiri dari 7 Sasaran Kegiatan dan 21 Indikator Kinerja. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja Pusat Pendidikan KP di Triwulan I Tahun 2023.

Pengukuran capaian kinerja Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP) Triwulan I Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja (*Key Performance Indicator*, disingkat KPI). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced*

scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja **Pusdik KP Triwulan I Tahun 2023 sebesar 102.18%**

Gambar 1. Hasil capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP pada tampilan web : kinerjaku.kkp.go.id



Selama triwulan I Tahun 2023, terdapat 3 indikator kinerja yang sudah terealisasi, antara lain :

1. IKU Aparatur KKP yang Diberikan Beasiswa (Orang), dengan target tahunan adalah 190 orang, target triwulan I adalah 99 orang, dan capaian sebanyak 99 orang;
2. IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Pendidikan KP (%), dengan target tahunan adalah 92%, target triwulan I adalah 92%, dan capaian sebesar 100%;
3. IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan Pusat Pendidikan KP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%), dengan target tahunan adalah 75%, target triwulan I adalah 75%, dan capaian sebesar 75%.

Secara umum, kinerja Pusat Pendidikan KP pada triwulan I cukup baik, namun hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kinerja adalah Indikator Kinerja yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan

BAB I



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025, dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 - 2024 telah menetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, dimana Kementerian Kelautan dan Perikanan berkontribusi pada beberapa agenda, salah satunya adalah “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan” melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan, dan Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Program prioritas KKP untuk implementasi Blue Economy dalam mendukung poros maritim dunia ada 5, yaitu :

1. Target perluasan kawasan konservasi 30 persen dari seluruh wilayah perairan Indonesia;
2. Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota berdasarkan zonasi;
3. Pengembangan budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
4. Menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik;
5. Program 'Bulan Cinta Laut' dengan membersihkan laut dari sampah di seluruh Wilayah Perairan Indonesia.

Adapun program-program prioritas BRSDM dalam mendukung poros maritim dunia ada 3, yaitu :

1. Transformasi Pendidikan (OII);
2. *SFV (Smart Fisheries Village)*;
3. Sertifikasi Pelatihan

Program dan Kegiatan Pusat Pendidikan KP Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Keputusan Kepala Pusat Pendidikan KP Nomor 177/PER-BRSDM.4/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Rencana Strategis Pusat Pendidikan KP Tahun 2022-2024, Keputusan Kepala Pusat Pendidikan KP Nomor 59/PER-BRSDM.4/2022 tentang Reviu

Rencana Strategis Pusat Pendidikan KP Tahun 2022 – 2024, Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Pusat Pendidikan KP Tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP

B. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Pusat Pendidikan KP Tahun 2023 memenuhi beberapa tujuan, yaitu:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Triwulan I Tahun 2023;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusat Pendidikan KP untuk meningkatkan kinerjanya setiap triwulan.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan berada di bawah unit eselon I Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP (BRSDM KP).

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Pusat Pendidikan KP melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang perencanaan dan evaluasi, kelembagaan dan ketenagaan, serta penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan evaluasi, kelembagaan dan ketenagaan, serta penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan kelautan dan perikanan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut Pusat Pendidikan KP didukung oleh kelompok jabatan fungsional.

Adapun struktur organisasi Pusat Pendidikan KP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, adalah sebagaimana struktur organisasi berikut

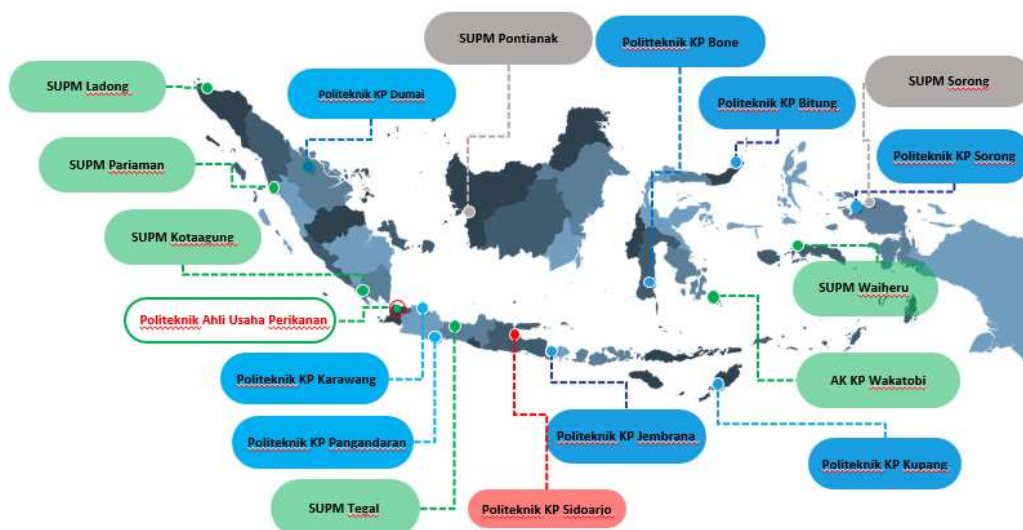
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusat Pendidikan KP



D. Keragaan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan KP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Pusat Pendidikan KP dibantu oleh 18 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan KP (dimana SUPM Bone dan SUPM Kupang sudah bergabung dengan Politeknik KP Bone dan Politeknik KP Kupang di tahun 2023 ini), sebagaimana berikut :

Gambar 1.2 Sebaran UPT Pendidikan KP



Keragaan SDM Pusat Pendidikan KP per Maret 2023 adalah 60 orang, untuk lingkup UPT Pendidikan KP terdiri dari 1.193 PNS dan 483 pegawai kontrak, dengan sebaran dapat dilihat pada infografis berikut ini :

Gambar 1.3 Keragaan Pegawai Pusat Pendidikan KP



Gambar 1.4 Sebaran Pegawai UPT Pendidikan KP



E. Sistematika Laporan Kinerja

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pendidikan KP adalah :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48 PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Triwulan I Tahun 2023.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Pusat Pendidikan KP seperti tugas dan fungsi serta struktur organisasi Pusat Pendidikan KP.
3. **Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Kerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2023 serta Pengukuran Kinerja.

4. **Bab III Akuntabilitas**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Permasalahan dan Rekomendasi.

BAB II



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Keputusan Kepala Pusat Pendidikan KP No.177/PER-BRSDM.4/2022 tentang Renstra Pusat Pendidikan KP Tahun 2022 – 2024 merupakan penjabaran dari Renstra BRSDMKP yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 180/PER-BRSDM/2022 tentang Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2022-2024. Renstra BRSDM menjelaskan Visi KKP yaitu **“Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Keberadaan Pusdik KP memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP dimaksud. Dukungan tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital dengan mewujudkan lembaga pendidikan yang bertaraf internasional.
2. Mencetak SDM unggul yang mampu bersaing sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri sehingga semua lulusan dapat berkarya baik bekerja di DUDI dan menjadi wirausaha yang handal.
3. Meningkatkan pendidikan SDM dan perluasan akses pendidikan vokasi bagi anak pelaku usaha KP, terbentuknya Lembaga pendidikan Baru yang lebih dekat dengan anak pelaku utama perikanan.
4. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar /peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan, dengan terbukanya diploma I bagi nelayan dan pelaku utama dibidang kelautan dan perikanan
5. Mewujudkan tatakelola riset dan SDM yang baik dan melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri, dengan terwujudnya kerjasama lembaga pendidikan luar negeri.

Selanjutnya, melalui Keputusan Kepala Pusat Pendidikan KP No.59/PER-BRSDM.4/2022 tentang Reviu Renstra Pusat Pendidikan KP Tahun 2022 – 2024, dukungan kegiatan pendidikan KP terhadap program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu lulusan satuan pendidikan KP yang mendukung program penangkapan terukur, kampung nelayan maju, dan kampung budidaya sebagaimana matrik berikut :

Tabel 2.1. Matrik Dukungan Pusat Pendidikan KP terhadap Program Prioritas KKP

No	Program Terobosan KKP	Dukungan Kegiatan	Jumlah Lulusan (Orang)		
			2022	2023	2024
1	Penangkapan Terukur	Lulusan satuan pendidikan KP yang mendukung penangkapan terukur	1.618	1.431	1.931
2	Kampung Nelayan Maju	Lulusan satuan pendidikan KP yang mendukung kampung nelayan maju	737	660	608
3	Kampung Perikanan Budidaya	Lulusan satuan pendidikan KP yang mendukung kampung perikanan budidaya	396	446	417

Tugas Pusat Pendidikan KP selaras dengan rencana pengembangan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa mendatang dimana IPTEK sangat dibutuhkan masyarakat. Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (*human-centered*) serta berbasis teknologi (*technology based*). *Cyber-physical system* (CPS) dalam Industri 4.0 merupakan integrasi antara *physical system*, komputasi dan juga *network* / komunikasi, sedangkan *society* 5.0 merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi *cyber-physical-human systems*.

Visi Pusat Pendidikan KP adalah mendukung visi BRSDM yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong melalui kegiatan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan berkualitas”.

Misi Pusat Pendidikan KP adalah :

1. Peningkatan kualitas SDM Kelautan dan Perikanan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan berbasis kerjasama industri;
2. Membangun sistem pendidikan KP berbasis digital/teknologi Informasi;
3. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan organisasi;
4. Peningkatan jaminan mutu kelembagaan pendidikan KP melalui pengelolaan pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui peningkatan tatakelola pemerintahan di lingkungan pendidikan kelautan dan perikanan.

Tujuan Pusat Pendidikan KP yang diharapkan adalah penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Pusat Pendidikan KP dalam rangka mencapai Sasaran Strategis pembangunan kelautan dan perikanan 2022 – 2024 adalah:

1. Menghasilkan SDM berkualitas dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan.
2. Memperluas akses pendidikan dengan berbasis digital/teknologi (*e-learning*) bagi anak pelaku utama pada satuan pendidikan kelautan dan perikanan.
3. Menjadikan Satuan Pendidikan KP sebagai pusat rujukan (*center of excellence*) oleh Satuan Pendidikan di Indonesia.
4. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial SDM secara efektif dan efisien.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pusat Pendidikan KP.

Sasaran Kegiatan yang akan dicapai Pusat Pendidikan KP pada tahun 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan KP Nomor 59/PER-BRSDM.4/2022 tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Pendidikan KP Tahun 2022 – 2024, adalah sebagai berikut:

1. SK1 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
2. SK2 Terselenggaranya Pengabdian Pendidikan Tinggi KP
3. SK3 Terselenggaranya Kajian Pendidikan Tinggi KP
4. SK4 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan KP Yang Terstandar
5. SK5 Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pendidikan KP
6. SK6 Aparatur yang Dididik
7. SK7 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat Pendidikan KP

Potensi Pusat Pendidikan KP adalah, Pusdik KP memiliki 18 Satuan Pendidikan, yang terdiri atas 10 (sepuluh) Politeknik KP, 7 (Tujuh) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan 1 (satu) Akademi Komunitas, dengan pendidik berjumlah 595 orang terdiri atas 190 guru, 398 dosen, dan 7 dosen tetap Non PNS, dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan *teaching factory* dengan 80% praktek dan 20% teori. Satuan Pendidikan Tinggi yang berada di bawah pembinaan Pusdik KP merupakan pendidikan vokasi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, mencakup program pendidikan Diploma I (D1), Diploma II (D2) Diploma III (D3) dan Diploma IV (D4) serta pasca sarjana terapan dengan **program studi unggulan** meliputi Agribisnis KP, Budidaya Air Payau, Kapal Perikanan, Penangkapan Ikan, Pengolahan Ikan, Perikanan Air Payau, Budidaya Laut, Kelautan, dan Ekowisata Bahari serta Konservasi. Satuan Pendidikan Menengah terdiri dari 7 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dengan **program**

keahlian unggulan Nautika Penangkapan Ikan, Budidaya Air Tawar, Budidaya Air Payau, Budidaya Laut, dan Pengolahan Perikanan. Lulusan pendidikan pada Satuan Pendidikan KP telah dilengkapi dengan sertifikasi berbagai bidang keahlian.

Namun, dibalik potensi Pusat Pendidikan KP, **ada permasalahan dan tantangan** yang dihadapi dalam pelaksanaan program pendidikan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

1. Belum terbangun sebuah sinergi hulu dan hilir pemanfaatan hasil SDM oleh Unit Teknis KKP dalam merealisasikan program prioritas KKP khususnya program prioritas yang ditetapkan sebagai *quick win* pembangunan sektor KP;
2. Belum optimalnya *link and match* instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dalam dan luar negeri, serta dunia usaha dan industri (DUDI) untuk meningkatkan kapasitas SDM KP yang dapat membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (*resource sharing*) dan serapan lulusan;
3. Masih kurangnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Pendidikan KP sebagai instrumen penjaminan mutu dan pengembangan SDM;
4. Sarpras pendidikan KP belum sepenuhnya terstandar sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI).

B. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023

Rencana Kerja (RK) merupakan penjabaran dari Renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan, untuk nantinya menjadi dasar penyusunan target pada indikator kinerja utama di PK Pusat Pendidikan KP dan cascading ke Satuan Pendidikan KP tahun 2023. Berikut adalah Renja Pusat Pendidikan KP berdasarkan DIPA Awal Tahun 2023:

Tabel 2.2 Rencana Kerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Target 2023	Alokasi Anggaran
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	8.291 orang	Rp.146.857.163.000
2	Terselenggaranya Pengabdian Pendidikan Tinggi KP	13 Paket	Rp.1.243.338.000
3	Terselenggaranya Kajian Pendidikan Tinggi KP	20 paket	Rp.1.800.000.000
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan KP yang Terstandar	2 Unit	Rp.47.934.439.000

No	Sasaran Kegiatan	Target 2023	Alokasi Anggaran
5	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pendidikan KP	5 Layanan	Rp.1.000.000.000
6	Jumlah Aparatur KKP yang diberikan Beasiswa	190 orang	Rp.8.408.830.000
7	Jumlah Aparatur KKP yang diberikan Izin Belajar	45 orang	Rp.91.170.000
8	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	19 Layanan	Rp.266.350.000.000
TOTAL			Rp.473.684.940.000

C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi BRSDM harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan, visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan sasaran kegiatan Pusat Pendidikan KP. Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2023 yang ditandatangani pada 9 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Revisi Desember Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Persentase Lulusan satuan pendidikan KP yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	75
		2	Lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (orang)	255
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	8.291
		4	Nilai NPBP Satker Lingkup Pusat Pendidikan KP (Rp. Miliar)	13,206
2	Terselenggaranya Pengabdian Pendidikan Tinggi KP	5	Desa mitra pendidikan KP yang meningkat kompetensinya (Desa Perikanan Cerdas) (Desa)	1
		6	Pengabdian kepada masyarakat KP (Unit)	12
3	Terselenggaranya Kajian Pendidikan Tinggi KP	7	Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi KP (Unit)	20
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan KP Yang Terstandar	8	Peralatan dan Mesin Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	2

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		9	Gedung Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	2
5	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pendidikan KP	10	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pendidikan KP (Dokumen)	5
6	Aparatur yang Dididik	11	Aparatur KKP yang diberikan beasiswa (Orang)	190
		12	Aparatur KKP yang diberikan izin belajar (orang)	45
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat Pendidikan KP	13	Unit kerja Pendidikan KP yang lolos penilaian menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Unit)	1
		14	Unit kerja lingkup Pusat Pendidikan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Unit)	4
		15	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Pendidikan KP dibandingkan realisasi anggaran Pusat Pendidikan KP TA. 2022 (%)	≤0,5%
		16	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pendidikan KP (indeks)	79
		17	Nilai PM SAKIP Pusat Pendidikan KP (Nilai)	80
		18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Pendidikan KP (Nilai)	92
		19	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Pendidikan KP (%)	92
		20	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Pusat Pendidikan KP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		21	Unit kerja lingkup Pusat Pendidikan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik	1

D. Pengukuran Kinerja

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja Triwulan I Pusat Pendidikan KP Tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) kinerja Triwulan I dengan realisasi triwulan I pada masing-masing indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing indikator.

Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup Pusat Pendidikan KP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember

BAB III

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

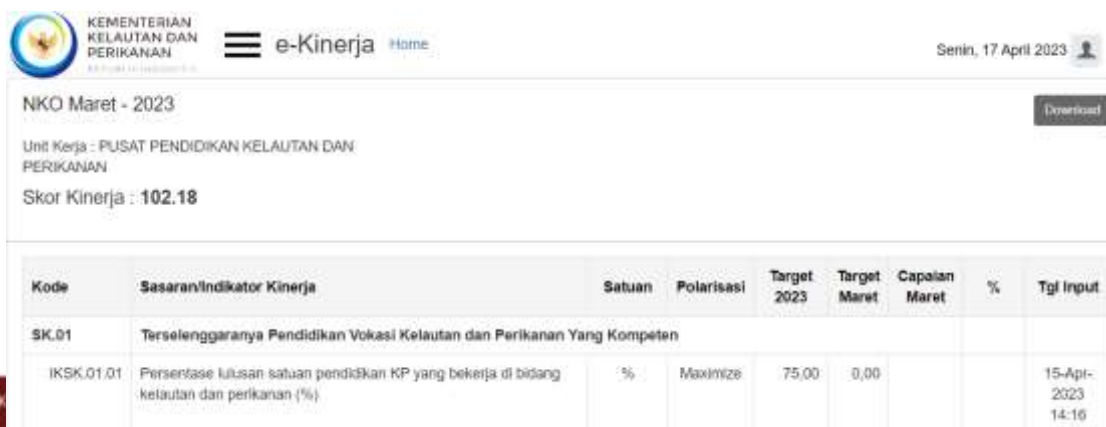
Pengukuran capaian kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Balanced Scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2023 sebesar 102,18%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:

Gambar 3.1. Gambar Capaian Kinerja Triwulan I Pusat Pendidikan KP Tahun 2023



Detail capaian kinerja Pusat Pendidikan KP sebagai berikut :

Gambar 3.2. Capaian Kinerja Triwulan I Pusat Pendidikan KP Tahun 2023 pada web kinerjaku.kkp.go.id



NKO Maret - 2023



Unit Kerja : PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

 Skor Kinerja : **102.18**

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target 2023	Target Maret	Capaian Maret	%	Tgl Input
IKSK.01.02	Lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (orang)	Orang	Maximize	255,00	0,00			15-Apr-2023 14:16
IKSK.01.03	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	Orang	Maximize	8.291,00	0,00			15-Apr-2023 14:16
IKSK.01.04	Nilai PNBSP Saiter Lingkup Pusat Pendidikan KP (Rp. Miliar)	Rp. Miliar	Maximize	13,21	0,00			15-Apr-2023 14:16
SK.02	Terselenggaranya Pengabdian Pendidikan Tinggi KP							
IKSK.02.01	Desa mitra pendidikan KP yang meningkat kompetensinya (Desa Perikanan Cerdas) (Desa)	Desa	Maximize	1,00	0,00			15-Apr-2023 14:16
IKSK.02.02	Pengabdian kepada Masyarakat KP	Unit	Maximize	12,00	0,00			15-Apr-2023 14:16
SK.03	Terselenggaranya Kajian Pendidikan Tinggi KP							
IKSK.03.01	Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi KP (Unit)	Unit	Maximize	20,00	0,00			15-Apr-2023 14:16
SK.04	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan KP Yang Terstandar							
IKSK.04.01	Peralatan dan Mesin Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	Unit	Maximize	2,00	0,00			15-Apr-2023 14:16
IKSK.04.02	Gedung Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	Unit	Maximize	2,00	0,00			15-Apr-2023 14:16
SK.05	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Pendidikan KP							
IKSK.05.01	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pendidikan KP (Dokumen)	Dokumen	Maximize	5,00	0,00			15-Apr-2023 14:16
SK.06	Aparatur yang Dididik						100,00	
IKSK.06.01	Aparatur KKP yang Diberikan Beasiswa (Orang)	Orang	Maximize	190,00	99,00	99,00	100,00	15-Apr-2023 14:16
IKSK.06.02	Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar (Orang)	Orang	Maximize	45,00	0,00			15-Apr-2023 14:16
SK.07	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker						104,35	
IKSK.07.01	Unit Kerja Pendidikan KP yang lolos penilaian Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Unit)	Unit	Maximize	1,00	0,00			15-Apr-2023 14:16
IKSK.07.02	Unit Kerja Pendidikan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Unit)	Unit	Maximize	4,00	0,00			15-Apr-2023 14:16
IKSK.07.03	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Pendidikan KP dibandingkan realisasi anggaran Pusat Pendidikan KP TA. 2022 (%)	%	Minimize	0,50	0,00			15-Apr-2023 14:16
IKSK.07.04	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pendidikan KP	Indeks	Maximize	79,00	0,00			15-Apr-2023 14:16
IKSK.07.05	Nilai PM SAKIP Pusat Pendidikan KP (Nilai)	Nilai	Maximize	80,00	0,00			15-Apr-2023 14:16

NKO Maret - 2023

Download

Unit Kerja : PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Skor Kinerja : 102.18

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target 2023	Target Maret	Capaian Maret	%	Tgl Input
IKSK.07.06	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Pendidikan KP (Nilai)	Nilai	Maximize	92,00	0,00			15-Apr-2023 14:16
IKSK.07.07	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Pendidikan KP (%)	%	Maximize	92,00	92,00	100,00	108.70	15-Apr-2023 14:16
IKSK.07.08	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Pusat Pendidikan KP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	%	Maximize	75,00	75,00	75,00	100.00	15-Apr-2023 14:16
IKSK.07.09	Unit kerja lingkup Pusat Pendidikan KP yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	Unit	Maximize	1,00	0,00			15-Apr-2023 14:16

Berdasarkan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023, dari 21 IKU Pusat Pendidikan KP, terdapat 3 IKU yang memiliki capaian kinerja di triwulan I ini, dan seluruhnya berstatus hijau.

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja Utama

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BRSDM KP..

Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 Pusat Pendidikan KP

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TRIWULAN I TAHUN 2023		
		TARGET	CAPAIAN	%
1 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1 Persentase Lulusan satuan pendidikan KP yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	0	0	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TRIWULAN I TAHUN 2023		
				TARGET	CAPAIAN	%
		2	Lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (orang)	0	0	-
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	0	0	-
		4	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pendidikan KP (Rp. Miliar)	0	0	-
2	Terselenggaranya Pengabdian Pendidikan Tinggi KP	5	Desa mitra pendidikan KP yang meningkat kompetensinya (Desa Perikanan Cerdas) (Desa)	0	0	-
		6	Pengabdian kepada masyarakat KP (Unit)	0	0	-
3	Terselenggaranya Kajian Pendidikan Tinggi KP	7	Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi KP (Unit)	0	0	-
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan KP Yang Terstandar	8	Peralatan dan Mesin Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	0	0	-
		9	Gedung Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	0	0	-
5	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pendidikan KP	10	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pendidikan KP (Dokumen)	0	0	-
6	Aparatur yang Dididik	11	Aparatur KKP yang diberikan beasiswa (Orang)	99	99	100,00
		12	Aparatur KKP yang diberikan izin belajar (orang)	0	0	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TRIWULAN I TAHUN 2023			
		TARGET	CAPAIAN	%	
7 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	13	Unit kerja Pendidikan KP yang lolos penilaian menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Unit)	0	0	-
	14	Unit kerja Pendidikan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Unit)	0	0	-
	15	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Pendidikan KP dibandingkan realisasi anggaran Pusat Pendidikan KP TA. 2022 (%)	0	0	-
	16	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pendidikan KP (indeks)	0	0	-
	17	Nilai PM SAKIP Pusat Pendidikan KP (Nilai)	0	0	-
	18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Pendidikan KP (Nilai)	0	0	-
	19	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Pendidikan KP (%)	92	100	108,69
	20	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Pusat Pendidikan KP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	75	100,00
	21	Unit kerja lingkup Pusat Pendidikan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik	0	0	-

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten

Indikator Kinerja Utama 1

Persentase lulusan satuan pendidikan KP yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%)

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana lulusan satuan pendidikan KP berkontribusi dan menerapkan ilmu yang telah didapat di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan. Target IKU ini adalah tahunan, dengan target sebesar 75% dari lulusan satuan pendidikan KP di tahun 2023. Sampai dengan triwulan I, kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung IKU ini antara lain :

1. Menginisiasi kerja sama dengan LPK INNA (Indonesia Nippon Anugerah), LPK OSIN, PT. OS Selanjaya Indonesia, dan PT Multidaya Teknologi Nusantara (eFishery) untuk penyerapan lulusan satuan pendidikan KP ;
2. Satuan pendidikan KP menjalin komunikasi kepada alumni melalui media sosial untuk memberikan update informasi terkait lowongan perusahaan;
3. Lulusan satuan pendidikan KP tidak hanya dibekali oleh Ijazah tetapi juga sertifikat kompetensi keahlian sehingga menjadi nilai tambah bagi para alumni dalam mencari pekerjaan yang sesuai di bidangnya.

Indikator Kinerja Utama 2

Lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (orang)

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2022-2024, menargetkan rasio Kewirausahaan pada tahun 2024 adalah 4,0% dengan *baseline* pada tahun 2019 sebesar 3,3% kemudian meningkat menjadi 3,6% pada tahun 2020, 3,7% pada tahun 2021, 3,8% pada tahun 2022, dan 3,9% pada tahun 2023. Untuk mendukung target Pemerintah, Pusat Pendidikan KP fokus untuk memaksimalkan potensi peserta didik yang memiliki jiwa wirausaha dengan pelaksanaan kegiatan kewirausahaan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menambahkan materi wirausaha ke dalam kurikulum pendidikan KP.

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target tahunan adalah sebanyak 255 orang dari lulusan di tahun 2023 untuk melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan. Sampai dengan triwulan I, kegiatan yang sudah dilakukan adalah :

1. Melakukan monitoring terhadap perkembangan rintisan wirausaha yang sudah dilakukan oleh peserta didik yang saat ini sudah tingkat III, untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi saat ini;
2. Menerapkan kurikulum kewirusahaan sesuai dengan kalender pendidikan per semesternya.

Indikator Kinerja Utama 3

Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)

Peserta didik merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan, karena tanpa adanya peserta didik tidak akan mungkin proses pembelajaran dapat berjalan. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Sudarwan Danim (2010: 1) “Peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal”. Peserta didik bisa belajar tanpa guru. Sebaliknya, guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Oleh karena itu kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik.

Tugas inilah yang diemban oleh Pusat Pendidikan dan Satuan Pendidikan KP, mengembangkan peserta didik sesuai potensi mereka yang tepat di dunia kelautan dan perikanan. KKP memiliki 7 SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah/ setara dengan SMK) , 1 Akademi Komunitas, dan 10 Politeknik Kelautan dan Perikanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, satuan pendidikan KP memiliki program studi/ program keahlian yang sesuai dengan permintaan di dunia usaha/ dunia industri, dengan garis besar program studi/ keahliannya antara lain penangkapan ikan, budidaya perikanan/ kelautan, permesinan kapal, dan pengolahan hasil produk kelautan/ perikanan.

Periode pengukuran IKU ini adalah semester, dan pada triwulan I, jumlah peserta didik eksisting adalah sebanyak 8.34 orang dari 18 satuan pendidikan KP. Tabel berikut menggambarkan jumlah peserta didik dari seluruh satuan pendidikan KP periode Triwulan I Tahun 2023 :

Tabel 3.2. Jumlah peserta didik pada Satuan Pendidikan lingkup KKP pada TA 2022/2023

No	Satuan Kerja	Jumlah Peserta Didik Semester Genap TA 2022/2023
1	Politeknik AUP Jakarta	2165
2	Politeknik KP Sidoarjo	512
3	Politeknik KP Bitung	454
4	Politeknik KP Sorong	364
5	Politeknik KP Karawang	284
6	Politeknik KP Bone	928
7	Politeknik KP Kupang	529
8	Politeknik KP Dumai	279
9	Politeknik KP Pangandaran	281
10	Politeknik KP Jembrana	396
11	AK Wakatobi	48
12	SUPM Ladong / Politeknik KP di Aceh	267
13	SUPM Pariaman / Politeknik KP di Pariaman	420
14	SUPM Kotaagung / Politeknik KP di Lampung	186
15	SUPM Tegal / Politeknik KP di Tegal	516
16	SUPM Pontianak	149
17	SUPM Waiheru / Politeknik KP di Maluku	456
18	SUPM Sorong	107
Total		8.341

Sampai dengan triwulan I ini, kegiatan yang mendukung IKU ini adalah sertifikasi taruna, dan kegiatan proses belajar mengajar.

Indikator Kinerja Utama 4

Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pendidikan KP (Rp. Miliar)

Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari **pajak** dan penerimaan bukan pajak yang disebut **penerimaan negara bukan pajak (PNBP)**.

Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

UU tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi:

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah

g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri

Nilai Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada KKP dan terdiri dari PNBPN Sumber Daya Alam (SDA), PNBPN Lainnya (Non SDA), dan PNBPN BLU. Sesuai PP 85 Tahun 2022 terdiri dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan dan pendidikan kelautan dan perikanan. Selain itu, ada juga pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya, dan juga pendapatan biaya pendidikan.

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target tahunan Rp.13,206 Miliar (Rp.13,206,611,000), dan sampai dengan triwulan I tahun 2023, nilai PNBPN yang sudah disetorkan ke negara dari seluruh satuan pendidikan KP adalah sebesar Rp.1,32 Miliar, atau sebesar Rp.1,323,687,711. Kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung pencapaian IKU ini antara lain penyetoran biaya pendidikan, penyetoran sewa tanah, gedung, dan bangunan, serta penyetoran hasil tambak.

Sasaran Kegiatan 2 **Terselenggaranya Pengabdian Pendidikan Tinggi KP**

Indikator Kinerja Utama 5

Desa mitra pendidikan KP yang meningkat kompetensinya (Desa Perikanan Cerdas) (Desa)

BRSDM sebagai penghasil inovasi teknologi dan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing memiliki peran dalam pembangunan KP melalui transfer teknologi untuk meningkatkan daya saing perekonomian. Desa Mitra, atau selanjutnya disebut Desa Perikanan Pintar / *Smart Fisheries Village* (SFV), adalah program yang dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BRSDM untuk memperkuat kemandirian desa berbasis usaha perikanan. Pengembangan SFV bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, komunitas pekerja, pelestarian lingkungan dan penerapan teknologi digital. SFV juga merupakan model pengembangan desa perikanan pintar secara terintegrasi dengan berkolaborasi bersama banyak pihak terkait yaitu pemerintah pusat dan daerah, akademisi, industri, serta masyarakat. SMART sendiri merupakan singkatan dari *Sustainable, Modernization, Acceleration, Regeneration, dan Technology*, sehingga melalui program ini diharapkan akan terbentuk desa-desa perikanan unggulan yang produktif, mampu menerapkan teknologi informasi, mandiri dan memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dan kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan triwulan I adalah :

1. Politeknik KP Sidoarjo sudah melakukan pembicaraan dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan untuk melakukan kegiatan Desa Mitra di Desa Sumber Dodol, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, pada Bulan Februari 2022;
2. Bimtek Budidaya Percontohan SFV di Bulan Maret 2023 untuk Pembudidaya Ikan di Desa Sumber Dodol

Indikator Kinerja Utama 6

Pengabdian kepada masyarakat KP (Paket)

Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Bertambahnya kecepatan proses peningkatan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan laju pertumbuhan pembangunan;
2. Bertambahnya kecepatan upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat yang harmonis serta dinamis yang siap menempuh perubahan-perubahan menuju perbaikan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat berkembang dalam kehidupan masyarakat yang berlaku;
3. Bertambahnya kecepatan usaha pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan laju pertumbuhan proses modernisasi dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

IKU ini merupakan IKU tahunan, sehingga belum diukur pencapaiannya di triwulan I ini. Namun, kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung kegiatan IKU ini adalah pelaksanaan PKM Tahap 1 / Semester Genap TA 2022/2023, dan proses penentuan lokasi dan jenis pengabdian yang akan dilakukan oleh satuan pendidikan tinggi KP untuk pelaksanaan PKM semester ganjil TA 2023/2024.

Sasaran Kegiatan 3 **Terselenggaranya Kajian Pendidikan Tinggi KP**

Indikator Kinerja Utama 7

Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi KP (Paket)

Sebagai bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bergerak di bidang pendidikan, maka satuan pendidikan tinggi KP mengemban tugas untuk mendukung visi dan misi KKP serta mengemban tanggung jawab dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Upaya merealisasikan pelaksanaan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pelaksanaan penelitian terapan pendidikan tinggi KP. Penelitian terapan sejatinya dilakukan lantaran memiliki tujuan untuk menemukan solusi atas suatu masalah yang secara langsung dihadapi oleh masyarakat, atau organisasi industri/bisnis. Disinilah satuan pendidikan tinggi KP hadir untuk bisa menemukan solusi atas masalah yang ada di masyarakat sekitar yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan.

IKU ini merupakan IKU tahunan, sehingga belum diukur pencapaiannya di triwulan I ini. Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung kegiatan IKU ini adalah menseleksi proposal penelitian dan belanja bahan penelitian

Sasaran Kegiatan 4

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan KP Yang Terstandar

Indikator Kinerja Utama 8

Peralatan dan Mesin Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)

Secara mekanis, peralatan diperlukan untuk mendesain mesin. Mesin adalah alat, yang digunakan untuk mengoperasikan tugas tertentu, sedangkan peralatan adalah seperangkat alat yang diperlukan untuk tujuan tertentu. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengajaran di satuan pendidikan KP, perlu juga ada peningkatan pada komponen prasarananya, salah satunya adalah peralatan dan mesin pendidikan KP. Indikator ini memiliki target sebanyak 2 unit, dan diturunkan ke 2 satuan pendidikan KP yaitu di : (1) Politeknik AUP Jakarta; dan (2) Politeknik KP Sidoarjo. Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dan kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan triwulan I adalah :

1. Penyusunan dokumen untuk pengadaan di Politeknik AUP. Mesin dan peralatan yang ditingkatkan adalah Meubelair Gedung VIP, Peralatan Drumband, Peralatan Asrama, dan Videotron;
2. Untuk Politeknik KP Sidoarjo, karena anggaran yang digunakan berasal dari pemanfaatan PNBPN, maka saat ini Politeknik KP Sidoarjo masih dalam tahap memaksimalkan penyetoran PNBPN. Mesin dan peralatan yang ditingkatkan adalah Ring Basket, Sarana Band, Alat Bor Tanah, Meja Pingpong, Peralatan Drum Band, dan Buku Perpustakaan.

Indikator Kinerja Utama 9

Gedung Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prasarana adalah “segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya”. Sementara itu, Daryanto dalam Administrasi Pendidikan mengatakan prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan misalnya lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya.

Indikator ini memiliki target 2 unit, dan diturunkan ke Politeknik AUP dan Politeknik KP Sidoarjo. Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dan sampai dengan triwulan I, kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU ini adalah :

1. Pelaksanaan pekerjaan Renovasi Gedung Direktorat, Auditorium Madidihang dan VIP, sudah pembayaran Uang Muka sebesar 25%, dan pembayaran Termin I untuk Renovasi Lapangan Upacara;
2. Untuk Politeknik KP Sidoarjo, karena anggaran yang digunakan berasal dari pemanfaatan PNBPN, maka saat ini Politeknik KP Sidoarjo masih dalam tahap memaksimalkan penyetoran PNBPN. Prasarana yang ditingkatkan Kapasitasnya adalah Pembangunan Tambak, Pembangunan Pos Jaga, Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Sasaran Kegiatan 5

Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Pendidikan KP

Indikator Kinerja Utama 10

Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pendidikan KP (Dokumen)

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi satuan pendidikan KP dan

penyelenggaranya untuk menjalankan penyelenggaraan pendidikan KP. IKU ini merupakan IKU tahunan sehingga pada triwulan I ini belum bisa diukur capaiannya, dengan target tahunan sebanyak 5 dokumen. Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU adalah proses legalisir untuk draft NSPK yang sudah diusulkan di tahun 2022 (Pedoman Wisuda Pendidikan Tinggi dan Pedoman Wisuda Pendidikan Menengah)

Sasaran Kegiatan 6 Aparatur yang Dididik

Indikator Kinerja Utama 11

Aparatur KKP yang diberikan beasiswa (Orang)

Salah satu upaya dalam peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan profesionalisme ASN di KKP dilakukan melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar bagi aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk jenjang Pendidikan S1, S2, dan S3. Diharapkan, pemberian tugas belajar dapat meningkatkan kemampuan aparatur KKP dalam menganalisis, menyajikan hasil pelaksanaan tugas dengan baik, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perumusan kebijakan kementerian lebih lanjut.

Tabel 3.3 Capaian IKU 11 : Aparatur KKP yang diberikan beasiswa (Orang)

Sasaran Kegiatan 4 : Aparatur yang Dididik									
IKU 11 : Aparatur KKP yang diberikan beasiswa (Orang)									
Realisasi TW I 2020 – 2022			2023					Renstra Pusdik 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022 - 2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
-	-	140	190	99	99	100%	- 29,29	200	95%

Pusat Pendidikan KP memberikan beasiswa kepada ASN KKP yang memenuhi syarat untuk jenjang pendidikan S2 dan S3 di perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Pusat Pendidikan KP. Pada tahun 2023, target tahunan IKU ini adalah 190 orang, dengan target di triwulan I adalah 99 orang, dan berdasarkan Memorandum dari Kepala Pusat Pendidikan KP kepada Kepala BRSDM KP No. 607/BRSDM.4/RC.510/IV/2023 tanggal 12 April 2023, capaiannya adalah 99 orang. Tabel berikut menjabarkan sebaran peserta tugas belajar di triwulan I tahun 2023.

Tabel 3.4 Sebaran Peserta Tubel Tahun 2019 - 2022

NO	INSTANSI	TAHUN								SUB JUMLAH		TOTAL
		2019	2020		2021		2022		S2	S3		
		S3	S2	S3	S2	S3	S2	S3				
1	SETJEN				3		1		4	0	4	
2	ITJEN						3		3	0	3	
3	DJPT				5		4		9	0	9	
4	DJPB			1	2		2		4	1	5	
5	PRL				3		4		7	0	7	
6	PDSPKP				1	1			1	1	2	
7	PSDKP				3		10		13	0	13	
8	BRSDM	3		10	6	9	13	13	19	35	54	
9	BKIPM				2				2	0	2	
JUMLAH		3	0	11	25	10	37	13	62	37	99	

Sampai dengan triwulan I, kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU adalah:

1. Monitoring petubel, baik ke pihak perguruan tinggi maupun ke petubelnya langsung;
2. Pembayaran biaya hidup dan biaya penelitian untuk PNS tugas belajar angkatan tahun 2019 – 2022.

Indikator Kinerja Utama 12

Aparatur KKP yang diberikan izin belajar (orang)

Salah satu upaya dalam peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan profesionalisme ASN di KKP dilakukan melalui pendidikan formal dengan pemberian rekomendasi ijin belajar bagi aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk jenjang Pendidikan S1, S2, dan S3. Diharapkan, pemberian rekomendasi ijin belajar dapat meningkatkan kemampuan aparatur KKP dalam menganalisis, menyajikan hasil pelaksanaan tugas dengan baik, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perumusan kebijakan kementerian lebih lanjut.

Target IKU ini adalah 45 orang, dengan periode pengukuran adalah tahunan. Kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung pencapaian IKU ini adalah:

1. Seleksi berkas pengajuan ijin belajar dari ASN KKP Tahun 2023;
2. Membuat rekomendasi ijin belajar kepada ASN KKP yang sudah memenuhi persyaratan pemberkasan.

Sasaran Kegiatan 7

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja Utama 13

Unit Kerja Pendidikan KP yang Lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Unit)

Merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik. Pembinaan, identifikasi dan membangun Unit Kerja yang akan Diusulkan menjadi ZI Menuju WBK/WBBM minimal 1 (satu) tahun dan/atau pada tahun berjalan sebelum diusulkan. Tim pembina/pendamping BRSDM yang terdiri dari unsur Sekretariat, dan Pusat terkait, melakukan pembinaan/pendampingan kepada satker yang ditunjuk sebagai calon menuju WBK, untuk penyiapan dokumen dalam memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses. Cek List Pemenuhan Dokumen ZI Menuju WBK telah disusun dan dipenuhi. Selanjutnya tim pembina/pendamping BRSDM, melakukan penilaian mandiri berdasarkan dokumen yang tersedia, mengacu pedoman dari Kementerian PAN dan RB, yaitu memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses minimal 75 pada Zona Integritas (ZI).

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target adalah 1 unit, yaitu Politeknik KP Pangandaran. Kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung IKU ini adalah pendampingan oleh tim Sekretariat BRSDM KP dalam penyusunan dan kesesuaian dokumen WBK sesuai LKE terbaru dengan hasil penilaian sebesar 71,26. Kemudian, telah dilakukan pendampingan oleh tim Inspektorat Jenderal I dalam penyusunan dan kesesuaian dokumen WBK sesuai LKE terbaru dengan hasil penilaian sebesar 82,62.

Indikator Kinerja Utama 14

Unit kerja lingkup Pusat Pendidikan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Unit)

Dalam rangka melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan KP mengusulkan 4 unit kerja pendidikan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yaitu (1) Politeknik KP Sidoarjo; (2) Politeknik KP Bitung; (3) Politeknik KP Karawang, dan (4) Politeknik KP Jembrana.

IKU ini merupakan IKU Tahunan, dan di triwulan I ini tidak dilakukan pengukuran kinerja. Kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung pencapaian IKU ini

pendampingan oleh Tim Sekretariat BRSDM KP dan Pusat Pendidikan KP terhadap satker - satker yang diusulkan menjadi WBK.

Indikator Kinerja Utama 15

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Pendidikan KP dibandingkan realisasi anggaran Pusat Pendidikan KP TA. 2022 (%)

IKU ini merupakan IKU yang bertujuan untuk mengetahui kepatuhan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK satker dan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Target pada tahun ini adalah $\leq 0,5\%$, dengan periode pengukuran adalah tahunan, sehingga di triwulan I ini tidak dilakukan pengukuran capaian. Kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung IKU ini antara lain:

1. Verifikasi berkas pertanggungjawaban belanja di Pusat Pendidikan KP;
2. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan aturan keuangan.

Indikator Kinerja Utama 16

Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pendidikan KP (indeks)

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Tujuan dari indikator kinerja ini adalah untuk mengukur profesionalitas ASN lingkup Pusat Pendidikan KP berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Perhitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan dengan cara menghitung indeks berdasarkan bobot 4 (empat) komponen yang telah ditetapkan meliputi: (1) Kualifikasi (Bobot 25%); (2) Kompetensi (Bobot 40%); Kinerja (Bobot 30%) dan (4) Disiplin (Bobot 5%).

Periode pengukuran IKU ini adalah semesteran, dan pada triwulan I tidak dilakukan pengukuran kinerja. Kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung IKU ini adalah:

1. Penyelesaian SKP 2022 dan SKP 2023;
2. Pegawai mengikuti peningkatan kompetensi melalui webinar untuk mendapatkan sertifikat.

Indikator Kinerja Utama 17

Nilai PM SAKIP Pusat Pendidikan KP (Nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (*input*) atau kegiatan (*output*) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau *outcome*. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, BRSDM KP selaku pembina dari Pusat/Balai lingkup BRSDM KP akan melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada Pusat Pendidikan KP.

Penilaian SAKIP di lingkup KKP menggunakan peraturan baru dengan terbitnya Permen PAN RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan mendasar dalam penilaian SAKIP yaitu adanya penggabungan dan pembobotan dalam komponen penilaian, keselarasan cascading untuk melihat keselarasan kinerja organisasi, sistem *reward and punishment*, penambahan kriteria penilaian dari 5 menjadi 8 kriteria, serta orientasi penilaian lebih kearah dampak implementasi SAKIP atau *outcome*.

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target nilai sebesar 80. Sampai dengan triwulan I tahun 2023, kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung pencapaian IKU ini antara lain dengan penyusunan dokumen perencanaan yang selaras antara PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, dan Rencana Aksi, serta melakukan penginputan target PK ke dalam aplikasi kinerja sesuai dengan manual IKU.

Indikator Kinerja Utama 18

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Pendidikan KP (Nilai)

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing - masing indikator yang

diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Kinerja dilakukan pada 4 (aspek) aspek yaitu:

a. Aspek Kepatuhan (Bobot 25%)

Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III;

b. Aspek Kesesuaian (Bobot 25%)

Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data;

c. Aspek Ketercapaian (Bobot 30%)

Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2023 pada aplikasi kinerjaku;

d. Aspek Ketepatan (Bobot 20%)

Aspek ketepatan dilakukan dengan melihat berdasarkan penyampaian LKJ tahunan pada aplikasi ESR (tanggal upload pada aplikasi ESR dibandingkan dengan tanggal batas sesuai ND Kepala Biro Perencanaan) dan penyampaian kepada atasan (tanggal Memo/surat pengantar penyampaian LKJ ke atasan dibandingkan dengan tanggal batas pada Permen KP 68/2017).

IKU ini merupakan IKU tahunan, dengan target tahunan adalah sebesar 92, dan di triwulan I ini tidak ada pengukuran kinerja. Kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung IKU ini antara lain:

1. Pengunggahan LKj Pusat Pendidikan KP Tahun 2022 secara tepat waktu ke dalam website Menpan RB melalui link <https://esr.menpan.go.id/>;
2. Pengunggahan dokumen – dokumen pendukung lainnya ke dalam website Menpan RB, seperti PK 2023, Manual IKU, Rencana Aksi, Rincian Target IKU Tahun 2023;
3. Penginputan Kinerja Triwulan I ke dalam Aplikasi Kinerjaku.

Indikator Kinerja Utama 19

Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Pendidikan KP (%)

IKU ini adalah IKU yang mengukur sejauh mana keaktifan pejabat dan staf perwakilan dari satuan kerja untuk membagikan informasi kegiatan yang dilakukan selama 1 triwulan dalam media sosial milik KKP yaitu bitrix24. Ada 3 komponen

perhitungan pada IKU ini, yaitu: (i) Sharing dokumen (Renstra, PK, Manual IKU, LKj), dan (ii) keaktifan Pejabat/staf unit kerja yang terpilih (berbagi berita dengan target per user adalah 3 poin, dimana nilai mengunggah berita dengan unsur 5W1H adalah 0,5 poin, mengunggah karya tulis, jurnal, infografis mendapatkan 1 poin, dan mengunggah video edukasi atau ajakan mendapatkan 3 poin), dengan penghitungan formula:

$$\% \text{ MP} = (20\% \times \text{Upload dokumen}) + (80\% \times \text{Keaktifan})$$

Tabel 3.5 Capaian IKU 19 : Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Pendidikan KP (%)

Sasaran Kegiatan 7 : Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker									
IKU 19 : Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Pendidikan KP (%)									
Realisasi TW I 2020 – 2022			2023					Renstra Pusdik 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022 - 2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
71,60	96,11	100	92	92	100	108,70	0	86	116,28

Per Triwulan I tahun 2023, target Triwulan I adalah 92%, dan berdasarkan Surat Dinas dari Sekretaris BRSDM KP No. B.2003/BRSDM.1/TU.210/IV/2023 tanggal 13 April 2023, capaian IKU MP Pusat Pendidikan KP adalah 100%, yang menandakan bahwa seluruh pejabat lingkup Pusdik KP sudah aktif membagikan informasi mereka melalui bitrix. Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini antara lain aktifnya penanggung jawab bitrix untuk senantiasa mengingatkan pejabat lingkup Pusat Pendidikan KP untuk membagikan kegiatannya melalui bitrix.

Indikator Kinerja Utama 20

Persentase rekomendasi hasil pengawasan Pusat Pendidikan KP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

IKU ini merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi). Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada Triwulan IV tahun 2022 (1 Oktober 2022 s.d 31 Desember 2022) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan Triwulan I tahun 2023 (31 Maret 2023).

Tabel 3.6 Capaian IKU 20 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan Pusat Pendidikan KP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

Sasaran Kegiatan 7 : Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker									
IKU 20 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan Pusat Pendidikan KP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)									
Realisasi TW I 2020 – 2022			2023					Renstra Pusdik 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022 - 2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
100	66,67	100	75	75	75	100,00	-25	70	107,14%

Per Triwulan I tahun 2023, dari target IKU sebesar 75%, KP berdasarkan Surat Dinas dari Sekretaris BRSDM KP No. B.1962/BRSDM.1/HP.510/IV/2023 tanggal 12 April 2023, capaian Pusat Pendidikan KP adalah 75%, dimana Pusat Pendidikan KP tidak menjadi objek pengawasan Itjen pada Triwulan I, sehingga capaian adalah 75%. Namun, selain itu, Pusat Pendidikan KP juga selalu berkoordinasi dengan Tim Itjen dan Tim Sekretariat BRSDM KP, untuk mengawal pengawasan yang dilakukan oleh Tim Itjen.

Indikator Kinerja Utama 21

Unit kerja lingkup Pusat Pendidikan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2023, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Target IKU di tahun 2023 adalah 1, dan diturunkan ke Politeknik KP Bitung. Politeknik KP Bitung sudah menyampaikan review proposal PIONS kepada Kepala BRSDM KP, dengan usulan yaitu yaitu PIONs (*Polytechnic Integrated Online System*) untuk layanan sertifikasi kelautan (BST, ATKAPIN, ANKAPIN) untuk bisa menjadi inovasi pelayanan publik.

C. Akuntabilitas Keuangan

Rupiah Murni

Anggaran Pusat Pendidikan KP Tahun 2023 bergabung dengan DIPA Satker Sekretariat BRSDM KP. Total pagu anggaran Pusat Pendidikan KP berdasarkan DIPA Awal tanggal 30 November 2022 adalah Rp. 23.288.180.000, dengan penyerapan anggaran per triwulan I tahun 2022 adalah Rp. 3.141.645.086, atau sebesar 13,49%. Detail realisasi anggaran ada pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Tabel realisasi anggaran per jenis belanja Pusat Pendidikan KP

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa	
			Keuangan	%	Keuangan	%
1	BELANJA BARANG	15.792.160.000	1.936.417.267	12,26%	13.855.742.733	87,74%
	a. Barang Operasional	2.195.658.000	326.324.778	14,86%	1.869.333.222	85,14%
	c. Barang Non Operasional	13.596.502.000	1.610.092.489	11,84%	11.986.409.511	88,16%
2	BELANJA PEGAWAI	7.036.020.000	1.205.227.819	17,13%	5.830.792.181	82,87%
3	BELANJA MODAL	460.000.000	-	0,00%	460.000.000	100,00%
	JUMLAH	23.288.180.000	3.141.645.086	13,49%	20.146.534.914	86,51%

Sementara jika dilihat dari anggaran berdasarkan pagu di Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP, dimana kinerja Pusat Pendidikan KP merupakan gabungan dari kinerja seluruh satuan pendidikan KP, maka pagu dan realisasi juga merupakan gabungan dari seluruh satuan pendidikan KP. Tabel berikut menggambarkan realisasi per Sasaran Kegiatan bidang pendidikan KP berdasarkan PK Awal Tahun 2023 :

Tahun 3.8 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	146.857.163.000	22.515.806.586	15,33%
2	Terselenggaranya Pengabdian Pendidikan Tinggi KP	1.243.338.000	270.850.366	21,78%
3	Terselenggaranya Kajian Pendidikan Tinggi KP	1.800.000.000	251.318.300	13,96%
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan KP yang Terstandar	47.934.439.000	1.133.598.267	2,36%
5	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Pendidikan KP	1.000.000.000	174.131.091	17,41%
6	Aparatur yang Dididik	8.500.000.000	1.146.968.346	13,49%

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
7	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	266.350.000.000	50.822.479.999	19,08%
TOTAL		473.684.940.000	76.315.152.955	16,11%

Secara umum kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2023 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti:

1. Disiplin dalam pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan rencana penarikan anggaran/ rencana operasional kegiatan yang sudah disusun;
2. IKU – IKU yang capaiannya menjadi bagian dari level I (BRSDM) dan level O (KKP), harus dikawal sejak awal agar tidak terjadi penumpukan pencarian data dukung di akhir tahun.

Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya Pusat Pendidikan KP

Organisasi Sektor Publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk Pusat Pendidikan KP. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung

dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi SMART DJA.

Sejak tahun 2021, DIPA Satker Pusat Pendidikan KP sudah menjadi satu dengan Satker Sekretariat BRSDM KP dan Satker Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP. Penyatuan DIPA ini membuat perhitungan nilai efisiensi disamakan nilainya dengan Satker Sekretariat BRSDM KP. Sampai dengan 31 Maret 2023, belum ada penginputan data ke dalam aplikasi SMART DJA, sehingga nilai efisiensi belum dapat dihitung.

BAB IV

BAB IV PENUTUP

A. Capaian Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP) Triwulan I Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*, disingkat KPI). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja **Pusdik KP Triwulan I Tahun 2023 sebesar 102.18%**

Gambar 4.1. Hasil capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP TW I 2023 pada tampilan web : kinerjaku.kkp.go.id



Selama triwulan I Tahun 2023, terdapat 3 indikator kinerja yang sudah terealisasi, antara lain :

1. IKU Aparatur KKP yang Diberikan Beasiswa (Orang), dengan target tahunan adalah 190 orang, target triwulan I adalah 99 orang, dan capaian sebanyak 99 orang;
2. IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Pendidikan KP (%), dengan target tahunan adalah 92%, target triwulan I adalah 92%, dan capaian sebesar 100%;

3. IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan Pusat Pendidikan KP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%), dengan target tahunan adalah 75%, target triwulan I adalah 75%, dan capaian sebesar 75%.

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum, kinerja Pusat Pendidikan KP pada triwulan I cukup baik, namun hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kinerja adalah Indikator Kinerja yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 GEDUNG MINA BAHARI II LANTAI 5
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Bambang Suprakto**

Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan


Bambang Suprakto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Persentase lulusan satuan pendidikan KP yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	75
		2	Lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (orang)	255
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	8.291
		4	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pendidikan KP (Rp. Miliar)	13,206
2	Terselenggaranya Pengabdian Pendidikan Tinggi KP	5	Desa mitra pendidikan KP yang meningkat kompetensinya (Desa Perikanan Cerdas) (Desa)	1
		6	Pengabdian kepada masyarakat KP (Unit)	12
3	Terselenggaranya Kajian Pendidikan Tinggi KP	7	Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi KP (Unit)	20
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan KP Yang Terstandar	8	Peralatan dan Mesin Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	2
		9	Gedung Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	2
5	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pendidikan KP	10	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pendidikan KP (Dokumen)	5
6	Aparatur yang Dididik	11	Aparatur KKP yang Diberikan Beasiswa (Orang)	190
		12	Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar (Orang)	45
7	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	13	Unit Kerja Pendidikan KP yang lolos penilaian Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Unit)	1
		14	Unit Kerja Pendidikan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Unit)	4
		15	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Pendidikan KP dibandingkan realisasi anggaran Pusat Pendidikan KP TA. 2022 (%)	≤0,5
		16	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pendidikan KP (indeks)	79
		17	Nilai PM SAKIP Pusat Pendidikan KP (Nilai)	80
		18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Pendidikan KP (Nilai)	92
		19	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Pendidikan KP (%)	92
		20	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Pusat Pendidikan KP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		21	Unit kerja lingkup Pusat Pendidikan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)	1

Data Anggaran

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	198.834.940.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	266.350.000.000
3	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	8.500.000.000
Total Anggaran Pendidikan KP Tahun 2023		473.684.940.000

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan


Bambang Suprakto